

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN USAHA MENENGAH, KECIL, DAN MIKRO (UMKM) DI MALAYSIA

**Annisa Zahrah**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: azahrah017@gmail.com

## **Abstrak**

Keberadaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) merupakan salah satu aspek terpenting dari tata kelola pemerintahan nasional. Banyak orang memandang UMKM sebagai salah satu penggerak penopang perekonomian negara. Pelaksanaan kegiatan UMKM tentunya dibutuhkan dorongan dari pemerintah agar kondusifnya pelaksanaan UMKM. Penulis berfokus pada kondisi dan keadaan dalam penerapan implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Malaysia dalam mengembangkan usahanya serta di sisi lain UMKM memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi negara. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif *library research* dengan Teknik pengumpulan data melalui artikel jurnal, repositori, dan pemantauan media online yang dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan sehingga data-data yang dikumpulkan diperiksa serta dihubungkan dengan informasi lainnya. Temuan yang diperoleh penulis ialah pemerintah telah membuat regulasi tentang pengembangan UMKM yang dikelola melalui koordinasi dengan berbagai pihak, melakukan strategi pemberdayaan UMKM dengan sasaran jangka panjang serta melakukan pengawasan terhadap berlakunya pelaksanaan kemitraan antar UMKM. Kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk memberdayakan usaha kecil yang dimaksudkan untuk membantu usaha kecil tumbuh dan berkembang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui strategi pemberdayaan UMKM.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, UMKM**

## **Abstract**

*The existence of Medium, Small and Micro Enterprises (MSMEs) is one of the most important aspects of national governance. Many people view MSMEs as one of the driving forces supporting the country's economy. The implementation of MSME activities certainly requires encouragement from the government so that the implementation of MSMEs is conducive. The author focuses on the conditions and circumstances in implementing MSME development policies in Malaysia in developing their businesses and on the other hand, MSMEs have a major contribution to the country's economic growth. Research that uses descriptive qualitative library research methods with data collection techniques through journal articles, repositories and online monitoring media which is carried out using library data collection methods so that the data collected is re-examined and linked with other information. The findings obtained by the author are that the government has made regulations regarding the development of MSMEs which are managed through coordination with various parties, implementing strategies for empowering MSMEs with long-term targets and monitoring the implementation of partnerships between MSMEs.*

**Keywords: Implementation, MSMEs, Policy**

## **PENDAHULUAN**

Kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan baik menentukan seberapa sukses perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh tingkat tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh lembaga pemerintahan, termasuk pemerintah daerah memiliki harus berkolaborasi dalam hal ini dengan menjalankan tugasnya masing-masing yang dilakukan

semata-mata hanya demi kemajuan negara dan kesejahteraan secara keseluruhan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membuktikan pentingnya UMKM dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. UMKM memerlukan pemberdayaan yang optimal dan berkelanjutan melalui berbagai strategi, antara lain pengembangan perusahaan, fasilitasi keuangan, akses pemasaran, fasilitasi pelatihan, perlindungan usaha, dan lain sebagainya. Semua ini diperlukan untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Untuk memastikan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) yang menyeluruh dan terkoordinasi di Malaysia, Dewan Pertumbuhan UKM Nasional (NSDC) didirikan dengan memiliki tugasnya sebagai badan pengambil kebijakan tertinggi di bidang pengembangan UKM mencakup pengembangan strategi pengembangan UKM di semua sektor ekonomi, mengoordinasikan kerja Kementerian dan lembaga terkait dalam program UKM, membina kolaborasi dengan sektor swasta, dan memastikan pengembangan UKM di Malaysia sebagai inisiatif yang dilaksanakan secara efektif. Peningkatan akses terhadap pendanaan, restrukturisasi keuangan, layanan konsultasi, informasi, pelatihan, dan koordinasi pemasaran merupakan beberapa inisiatif yang dilakukan di bawah NSDC. Selain itu, database UKM yang komprehensif juga dibentuk untuk melacak kemajuan UKM di semua sektor ekonomi (About SME Corp. Malaysia, 2020).

Dewan Pengembangan Pengusaha dan UKM Nasional (NESDC), yang didirikan pada tahun 2004, telah menawarkan sejumlah sumber daya untuk membantu pertumbuhan UMKM di Malaysia. Lanskap UMKM telah berkembang secara signifikan antara tahun 2016 dan 2020, dalam jangka waktu Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11). Terdapat total 1.151.339 UMKM pada tahun 2020, yang mencakup 97,2% dari seluruh perusahaan di Malaysia. Sebagai perbandingan, terdapat 1.086.533 UMKM pada tahun 2016. Antara tahun 2016 dan 2020, terdapat peningkatan sekitar 65.000 usaha, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 4,9% (National Entrepreneur and SME Development Council (NESDC), 2021).

Perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk usaha mikro, sangat penting dalam proses transformasi ekonomi Malaysia karena mereka mendorong pertumbuhan, lapangan kerja, dan pendapatan. Malaysia membutuhkan “game changer” dalam transisi ekonomi menuju masyarakat berpenghasilan tinggi pada tahun 2020, di tengah perubahan lingkungan eksternal dan persaingan global yang semakin meningkat. Kinerja UMKM meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Dina Arfianti Siregar, 2020). Departemen Statistik Malaysia (DoSM) melaporkan bahwa nilai yang dihasilkan oleh UMKM mencapai RM580,4 miliar, meningkat secara signifikan dari RM520,0 miliar pada tahun 2021, dan kontribusinya terhadap PDB meningkat menjadi 38,4% dari 37,4%. Kemudian, pada tahun 2022, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Malaysia mencapai peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 11,6%, melebihi pertumbuhan PDB negara secara keseluruhan sebesar 8,7%. Dengan pangsa sebesar 84,6%, industri jasa dan manufaktur masih menjadi penyumbang PDB UMKM terbesar (The Star, 2023).

Di Malaysia, terdapat beberapa undang-undang yang membantu pemilik bisnis, termasuk undang-undang yang menyediakan layanan keuangan, infrastruktur fisik, dan konsultasi bisnis. Pengembangan kewirausahaan banyak dibantu oleh pemerintah. *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM) melaporkan bahwa ada banyak proyek yang dipimpin

pemerintah di Malaysia yang dijalankan oleh para profesional yang menawarkan uang tunai kepada pemilik usaha. Hibah kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) kini diberikan oleh 14 organisasi di bawah naungan 8 kementerian. *The Ministry of Science, Technology and Innovation* (MOSTI), Unit Inovasi Khas (UNIK), *Malaysian Innovation Agency* (AIM), *Ministry of Higher Education* (MOHE), dan *Malaysian Technology Development Corporation* (MTDC) adalah beberapa contoh kementerian penting dan organisasi. Mereka bertanggung jawab atas hukum yang mengatur inovasi (Nurul Huda Md Yatim, 2019).

Berangkat dari pemikiran bahwa tingginya potensi UMKM dalam mengembangkannya ekonomi negara, diperlukannya analisis lebih mendalam terkait implementasi UMKM di Malaysia. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada factor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Malaysia, dengan rumusan factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Malaysia. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Malaysia.

### **Kebijakan Publik**

Halord Laswell (dalam Riant Nugroho, 2006:4) memberikan penjelasan mengenai kebijakan publik sebagai suatu program yang memiliki tujuan, pedoman, dan adat istiadat tertentu. Selanjutnya, Mustopadidjaya (dalam Wahab, 2001:4) menyatakan bahwa pilihan untuk menerapkan tindakan tertentu yang diambil oleh birokrasi pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu dikenal sebagai kebijakan publik. Berdasarkan definisi-definisi di atas, jelas bahwa kebijakan publik merupakan suatu upaya yang berupaya untuk mengatasi persoalan-persoalan kemasyarakatan. Kebijakan public tidak tercipta begitu saja, melainkan kebijakan public ditetapkan melalui sejumlah proses. Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono (2009:13) menyatakan proses kebijakan public terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*),
- b. Formulasi Kebijakan (*policy formulation*)
- c. Pembuatan Kebijakan (*decision making*)
- d. Implementasi Kebijakan (*policy implementation*)
- e. Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*).

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Hinggris (dalam Harbani Parsolong, 2010:57) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai gambaran berbagai tindakan yang diambil oleh sumber daya manusia untuk mencapai tujuan sumber daya lain guna mencapai tujuan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan sumber daya untuk implementasi kebijakan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Sejumlah karakteristik atau keadaan yang berbeda dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Banyak ahli yang memberikan pemikirannya mengenai karakteristik atau penyebab yang mempengaruhi kebijakan publik.

Smith (1973:202-205) mengidentifikasi empat variable yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan public, yaitu:

- 1) Kebijakan (Program) Ideal (*Idealized Policy*)

Kebijakan ideal diartikan sebagai interaksi yang ideal dimana pembuat kebijakan sedang berusaha untuk menginduksikan pola tersebut. Ada empat indikator yang berpengaruh dalam kebijakan ideal, yaitu:

- (a) kebijakan resmi,
- (b) jenis kebijakan. Jenis kebijakan dapat dibagi menjadi 3 kategori: (1) kebijakan yang mungkin kompleks atau sifatnya sederhana, (2) kebijakan dapat dikategorikan sebagai organisasi atau non-organisasi, (3) kebijakan juga dapat diklasifikasi sebagai berikut; distributive, redistribif, peraturan, peraturan sendiri, atau symbol emosi.
- (c) program meliputi tiga aspek yaitu: (1) intensitas dukungan yang berkaitan dengan seberapa jauh komitmen pemerintah untuk melaksanakan kebijakan, (2) sumber kebijakan berkaitan dengan sumber kebijakan yang dirumuskan apakah berasal dari kebutuhan dan tuntutan dalam masyarakat, (3) lingkup dimaksudkan mengenai lingkup dalam pelaksanaan kebijakan.
- (d) gambaran kebijakan meliputi gambaran-gambaran dari kelompok sasaran dan para implementor terhadap kebijakan.

#### 2) Kelompok Sasaran (*Target Group*)

Kelompok sasaran didefinisikan sebagai orang-orang yang paling dipengaruhi oleh kebijakan atau orang-orang yang menjadi sasaran dalam kebijakn. Beberapa factor yang berkaitan dengan kelompok sasaran yaitu: tingkat organisasi atau pelembagaan kelompok sasaran, pimpinan kelompok sasaran, dan pengalaman kebijakan sebelumnya dari kelompok sasaran.

#### 3) Organisasi Pelaksana (*Implementing Organization*)

Organisasi Pelaksana(*Implementing Organization*) adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Organisasi pelaksana dalam hal ini, adalah badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah. Ada tiga variable yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu: struktur personil, pimpinan organisasi administrasi, dan pelaksanaan program dan kapasitas.

#### 4) Faktor Lingkungan (*Enviromental Factors*)

Faktor lingkungan merupakan faktorOfaktor yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan. Factor lingkungan meliputi kondisi lingkungan social, budaya, ekonomi, dan politik.

### **Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM)**

Malaysia tidak mengadopsi definisi umum tentang UKM. Peneliti awal menggunakan definisi mereka sendiri karena kurangnya definisi umum. Beberapa orang menggunakan indikator numerik, termasuk jumlah karyawan dan modal tetap, untuk mendefinisikan UKM. UKM adalah bisnis dengan jumlah karyawan kurang dari 200 orang dan aset tetap kurang dari RM2,5 juta (Abdullah, 2002). Pada tahun 20005, NSDC mendukung penerapan definisi umum UKM pada tiga industri penting yakni pada bidang manufaktur dan jasa terkait manufaktur, pertanian primer, dan jasa. Secara umum, jumlah karyawan tetap dan omset penjualan tahunan digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Untuk sektor manufaktur, sektor pertanian dan jasa primer klasifikasi yang ditetapkan berbeda dipilih.

Sebuah organisasi ditetapkan sebagai UKM di sektor pertanian dan jasa jika omset penjualan tahunannya tidak melebihi RM5 juta atau memiliki kurang dari 50 karyawan. Sebuah

organisasi di industri manufaktur dianggap UKM jika memiliki kurang dari 150 karyawan dan omset penjualan tahunan kurang dari RM 25 juta. Alih-alih tiga sektor yang disebutkan dalam definisi sebelumnya, definisi baru UKM diadopsi untuk dua sektor: manufaktur dan jasa serta sektor lainnya. Batasan kualifikasi untuk dua kriteria—perputaran penjualan dan lapangan kerja berdasarkan sektor dan skala operasi—telah ditingkatkan berdasarkan revisi definisi UKM. Sesuai dengan definisi yang direvisi, suatu bisnis dianggap sebagai UKM jika penjualan tahunannya kurang dari RM50 juta (sebelumnya RM25 juta) atau mempekerjakan kurang dari 200 (sebelumnya 150) pekerja penuh waktu di sektor manufaktur, atau kurang dari RM20 juta (sebelumnya RM5 juta) atau mempekerjakan kurang dari 75 (sebelumnya 50) pekerja penuh waktu di sektor jasa dan sektor lainnya (Yee-Whah Chin, 2018).

Usaha kecil dan menengah mencakup hampir 97,30% dari seluruh usaha di Malaysia. Manufaktur adalah konversi fisik atau kimia bahan mentah atau komponen menjadi barang jadi. Yang dimaksud dengan “jasa dan lain-lain” adalah semua usaha yang menyediakan jasa, termasuk usaha yang bergerak dalam industri perhotelan dan restoran, usaha dan perdagangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, jasa profesional dan TIK, hiburan, intermediasi keuangan, dan jasa yang berkaitan dengan manufaktur, misalnya seperti R&D, gudang, dll (Ravi Ramasary A. M., 2020).

*Table 1 Rincian sektor UKM dan ukurannya*

Various Sectors	No. of SMEs Establishment				Percentage of Establishment		
	Micro	Small	Medium	Total SMEs	% of SMEs	No. of Large Firms	Overall Establishments
Services	649,186	148,078	11,862	809,126	89.2	9,185	818,311
Manufacturing	22,083	23,096	2,519	47,698	5.3	1,403	49,101
Construction	17,321	17,008	4,829	39,158	4.3	1,400	40,558
Agriculture	4,863	4,143	1,212	10,218	1.1	1,410	11,628
Mining & Quarrying	217	458	190	865	0.1	161	1,026
<b>Total</b>	<b>693,670</b>	<b>192,783</b>	<b>20,612</b>	<b>907,065</b>	<b>100,00</b>	<b>13,559</b>	<b>920,624</b>

Sumber: Departemen Statistik Malaysia, 2016

Ada banyak organisasi pendukung di Malaysia yang mempunyai tanggung jawab khusus dalam memastikan implementasi program yang dimaksudkan untuk meningkatkan UKM dan membangun hubungan antara UKM Malaysia dan perusahaan-perusahaan besar milik lokal atau internasional. Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI), yang mendorong pertumbuhan operasi industri dan membantu serta melindungi kepentingan Malaysia di arena perdagangan internasional, adalah organisasi utama yang mendukung UKM di Malaysia. Organisasi utama pemerintah untuk mempromosikan sektor industri dan jasa di Malaysia adalah Asosiasi Pengembangan Industri Malaysia (MIDA), yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Otoritas Pengembangan Investasi Malaysia. Perusahaan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (SMIDEC), badan pemerintah pendukung lainnya, bertugas mengembangkan UKM Malaysia yang mampu dan kuat sehingga mereka dapat bersaing secara internasional. Tujuan MATRADE (Perusahaan Pengembangan Perdagangan Eksternal Malaysia) adalah untuk mempromosikan Malaysia dan membantu banyak bisnis lokal dalam memperoleh keunggulan kompetitif di pasar internasional.

## **METODE**

Tulisan ini merupakan literature review dari artikel penelitian. Literature review adalah bagian penting dalam sebuah penelitian, yang melibatkan penyusunan, evaluasi, dan integrasi informasi dari sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Literature review membantu untuk mengidentifikasi gap dalam penelitian yang ada dan memberikan dasar teoritis untuk penelitian baru. Penelusuran artikel melalui Google Scholar dengan kata kunci yang digunakan dimensi kebijakan publik dan UMKM. Kriteria artikel yang digunakan yaitu dipublikasikan 5 tahun terakhir yaitu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pada UMKM di Malaysia, jurnal mempunyai judul dan isi yang sesuai dengan tujuan penelitian, full text, dan keterkaitan dengan UMKM. Hal ini bertujuan untuk kemutakhiran hasil riset dan keterbaruan pengambilan database.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Regulasi Pemerintah**

*SME Corporation Malaysia* (SME Corp. Malaysia) milik Kementerian Kewirausahaan & Pengembangan Koperasi (MECD) adalah badan koordinasi pusat (CCA) yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan program pengembangan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di semua sektor terkait baik dari Kementerian maupun lembaga. Selain memberikan layanan konsultasi bisnis kepada UKM dan pengusaha di seluruh tanah air, lembaga ini juga menjadi rujukan utama penelitian dan diseminasi data mengenai UKM dan pengusaha. Pada tanggal 27 September 2021, Perdana Menteri YAB mempresentasikan Rencana Malaysia Kedua Belas (RMKe-12) di Dewan Rakyat untuk tahun 2021 hingga 2025. Tiga tema besar, termasuk mengatur ulang perekonomian, meningkatkan keamanan, kesejahteraan, dan inklusivitas, serta seiring dengan peningkatan keberlanjutan, yang menjadi dasar Rencana. Inisiatif RMKe-12 merupakan upaya pemerintah merencanakan dan melaksanakan agenda pembangunan nasional berkelanjutan sesuai dengan tujuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, Visi Kemakmuran Bersama, dan semangat Keluarga Malaysia.

#### 1) Penggerak Kebijakan 1: Mengembangkan Bakat Masa Depan.

Pengembangan talenta yang sangat terlatih akan diperlukan untuk memenuhi tuntutan perekonomian yang sedang berkembang guna mencapai target pertumbuhan RMKE-12. Namun, masih terdapat permasalahan yang terjadi pada pasar kerja dan bidang pendidikan. Masalah-masalah ini mencakup buruknya rasio kompensasi pekerja terhadap PDB, pasar tenaga kerja yang tidak efisien, terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi, dan kelemahan dalam manajemen lembaga pendidikan. Untuk membangun talenta masa depan, Rencana Kedua Belas akan menyelaraskan kembali pasar tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Mempromosikan kompensasi karyawan yang adil dan partisipasi tenaga kerja serta memperkuat dukungan pasar tenaga kerja adalah beberapa inisiatif penting untuk menyelaraskan kembali pasar tenaga kerja.

#### 2) Penggerak Kebijakan 2: Akselerasi Teknologi Adopsi dan Inovasi.

Adopsi teknologi dan inovasi baru pada dasarnya memungkinkan aspek-aspek yang akan mendorong pertumbuhan di semua industri. Untuk menciptakan ekonomi berteknologi tinggi, proses digitalisasi akan dipercepat dan penggunaan teknologi mutakhir, khususnya teknologi *Fourth Industrial Revolution* (4IR) akan didorong. Dengan melakukan hal ini, Malaysia akan mengatasi permasalahan seperti infrastruktur dan layanan digital yang tidak memadai, tata kelola yang terfragmentasi, kesenjangan digital yang semakin besar, kapasitas dan kemampuan yang tidak memadai untuk penelitian, pengembangan, komersialisasi, dan inovasi, dan lambatnya adopsi teknologi. Untuk menghasilkan dan membuka peluang baru RMKE-12 akan mempercepat adopsi dan penerapan teknologi digital dan canggih di Malaysia.

Hal ini akan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi digital. Penelitian dan pengembangan akan ditingkatkan sementara bakat dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi digital dan 4IR akan ditingkatkan. Malaysia akan secara aktif melakukan investasi di bidang ekonomi digital untuk menjadi yang terdepan di kawasan ini. Penekanannya adalah pada percepatan serta memanfaatkan potensi teknologi mutakhir sekaligus mengarusutamakan digitalisasi untuk pertumbuhan yang adil.

### 3) Penggerak Kebijakan 3: Meningkatkan Konektivitas & infrastruktur transportasi.

Transportasi dan logistik sangat penting untuk memfasilitasi pertumbuhan di semua sektor ekonomi. Peningkatan konektivitas tahap pertama dan terakhir, daya saing industri, dan tata kelola semuanya akan diprioritaskan. Namun, kesulitan dalam menyediakan infrastruktur transportasi dan logistik yang dapat diandalkan serta konektivitas yang lancar terus menghambat upaya untuk memenuhi permintaan yang meningkat.

Dengan meningkatkan aksesibilitas terhadap transportasi umum, memfasilitasi perdagangan, dan memperkuat lingkungan kelembagaan dan peraturan, penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang efektif dan inklusif akan terus menjadi fokus utama. Melalui integrasi jaringan kereta api dan jalan raya antara bandara, pelabuhan, kawasan industri, dan kota, langkah-langkah akan diambil untuk meningkatkan konektivitas jarak jauh. Infrastruktur dan kapasitas layanan pelabuhan akan diperluas, dan penyedia layanan yang sama akan menggunakan pendekatan multimoda untuk memindahkan kargo.

### 4) Penggerak Kebijakan 4: Memperkuat Pelayanan Publik.

Pada dasarnya, pendukung kebijakan ini mendukung semua tema dan pendukung kebijakan lainnya yang meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjamin kemajuan sosio-ekonomi Malaysia yang berkelanjutan. Sektor publik akan terus meningkatkan penggunaan teknologi digital, pengambilan keputusan yang berpusat pada masyarakat, pelaksanaan proyek, serta kolaborasi dan koordinasi di antara tiga tingkatan pemerintahan. Dengan fokus pada integritas dan keterbukaan, sektor publik akan semakin ditingkatkan dengan mengenali talenta yang ada, lingkungan tata kelola, dan kekurangan manajemen proyek. Prioritas RMKE-12 akan mencakup penguatan penganggaran dan manajemen proyek, penciptaan pegawai negeri sipil yang berkinerja tinggi, dan perluasan pendekatan seluruh pemerintahan.

Kunci untuk meningkatkan penyampaian layanan publik dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia adalah dengan melakukan transformasi sektor publik melalui strategi keseluruhan pemerintah. Struktur dan fungsi kementerian dan lembaga harus ditinjau dan disederhanakan, dan tugas serta tanggung jawab antara anggota pemerintahan dan pegawai negeri harus didefinisikan dengan jelas. Pelayanan publik juga akan ditingkatkan melalui perbaikan proses pemilihan pemimpin penting, proses perekrutan pegawai profesional dan manajerial, serta percepatan digitalisasi.

### **Koordinasi dan Tata Kelola Pengembangan UMKM**

Dewan Pengembangan UMKM (NSDC) yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Malaysia ke-IX didirikan oleh pemerintah Malaysia dalam upaya mengembangkan UMKM yang tangguh dan kompetitif. Berdirinya NSDC pada tahun 2004 memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan operasional dan rencana strategis pengembangan UMKM. Area fokus utama NSDC adalah: (1) perumusan kebijakan umum dan strategi untuk mendukung UMKM di semua sektor; (2) peran dan tanggung jawab pemerintah serta departemen/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan UMKM; (3) kerja sama dan koordinasi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pengembangan, kebijakan, dan rencana aksi UMKM; (4) mendorong pihak swasta untuk berperan mendukung pengembangan UMKM; dan (5) memberikan prioritas pada pengembangan UMKM Bumiputera pada seluruh sektor perekonomian.

Di balik strategi pertumbuhan UMKM yang menyeluruh, Malaysia terus menghadapi banyak permasalahan dan hambatan. Permasalahan tersebut antara lain adalah kurangnya tenaga kerja yang tajam, belum memadainya kerangka koordinasi kelembagaan, dan belum memadainya kerangka kebijakan pengembangan UMKM. Rumitnya permasalahan yang ada tampaknya semakin meningkat, dan muncul kekhawatiran baru baik secara nasional maupun internasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya persaingan yang ketat dan terbatasnya kapasitas untuk mengatasi permasalahan pasar dan liberalisasi global.

Selain itu, kurangnya akses efektif terhadap pembiayaan bagi UMKM di Malaysia, sehingga menghambat upaya untuk mendukung UMKM yang kompetitif. Untuk melampaui rintangan dan rintangan tersebut, pemerintah Malaysia mengembangkan serangkaian kebijakan dan strategi, termasuk: (1) mendidik dan memberi penghargaan kepada praktisi UMKM; (2) memperluas pusat pembinaan UMKM yang memberikan layanan konsultasi dengan harga terjangkau bagi UMKM di berbagai bidang (perencanaan keuangan, pemasaran, teknologi informasi, dan lain-lain); dan (3) Program pengembangan bisnis Bumiputera, yang memungkinkan UMKM memasuki industri tertentu sebagai vendor dan menjalin kemitraan dengan bank untuk memberikan pendanaan dan layanan konsultasi kepada UMKM.

Malaysia tidak hanya berfokus pada kebijakan pemerintah, namun juga menggunakan teknik untuk membantu UMKM berkembang dengan dukungan dari organisasi lainnya. Usaha Kecil dan Menengah Corp merupakan salah satu organisasi yang berperan penting bagi pertumbuhan UMKM di semua industri (SME Corp). Selain itu, organisasi ini bekerja sama dengan bank, khususnya untuk mendukung UMKM di Malaysia melalui berbagai program, khususnya di bidang yang memberikan akses pendanaan. Program dan kebijakan untuk



menjamin akses yang cukup dicapai melalui penyediaan modal awal, pembiayaan untuk perluasan usaha, dan pemulihan atau pemeliharaan usaha.

Selain itu, Bank UMKM menawarkan program unik yang dirancang untuk mendorong pembangunan ekonomi pedesaan dengan membangkitkan semangat kewirausahaan dalam masyarakat. Organisasi ini bekerja sama dengan bank, khususnya dalam mendukung UMKM Malaysia yang berpartisipasi dalam sejumlah program, khususnya yang memberi mereka akses terhadap pendanaan. Program dan kebijakan untuk menjamin akses yang cukup dicapai melalui penyediaan modal awal, pembiayaan untuk perluasan usaha, dan pemulihan atau pemeliharaan usaha. Selain itu, Bank UMKM menawarkan program unik yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan dengan menumbuhkan budaya kewirausahaan dan tanggung jawab sosial. Bank UMKM menjadi motor penggerak pengembangan kompleks industri wirausaha terpadu yang menawarkan pelatihan, konsultasi keuangan, penyewaan ruang pabrik, dan layanan pembiayaan.

### **Strategi Pemberdayaan**

UMKM Malaysia terutama bergerak dalam kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan manufaktur. Cara pendanaan UMKM sebagai salah satu komponen rantai nilai pengembangan industri manufaktur tercakup dalam kebijakan pengembangan UMKM secara keseluruhan (Yunirti, 2019). Strategi yang dikemukakan oleh Chandler (Alfred D. Chandler, 2005) merupakan identifikasi tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan. Melaksanakan rencana dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Berikut beberapa strategi pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab untuk pengembangan UMKM di Malaysia (Mongid, 2011).

1. Pemerintah memberikan berbagai insentif kepada UMKM serta informasi cara memperolehnya yang diberikan kepada perusahaan yang benar-benar peduli terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM lokal. Pemerintah menawarkan insentif melalui berbagai jalur, namun dalam praktiknya hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan UMKM dan memberikan peluang bagi pihak ketiga untuk mengambil keuntungan secara tidak adil melalui mediasi antara UMKM dan pemerintah. Hal ini menjadikan usaha kecil tidak praktis dan mahal dalam memanfaatkan manfaat ini. Oleh karena itu, pemerintah harus menghindari pemberian insentif melalui jumlah agen yang berlebihan dan menghilangkan proses birokrasi yang membuat inisiatif dan program pemerintah menjadi tidak efisien.
2. Pemerintah perlu meningkatkan jumlah pusat pembinaan UMKM yang memberikan konseling dan layanan ahli bagi UMKM, serta lebih banyak spesialis dari sektor lain (seperti IT, perencanaan keuangan, perencanaan pemasaran, dan lain-lain). Hal ini harus menjamin bahwa UMKM mempunyai akses terhadap insentif dengan harga yang wajar dan lebih efisien. Untuk penyerapan dan pemanfaatan, efisiensi dan efektivitas sistem pemberian insentif sangatlah penting.
3. infrastruktur bisnis utama harus diperkuat dan diaktifkan. Dengan bantuan kebijakan ini, operasional dan kegiatan UMKM dapat dengan mudah diatur melalui pedoman, standar, kriteria perizinan, dan insentif keuangan serta bisnis untuk membuat dan meningkatkan prosedur operasional, data manajemen, dan infrastruktur fisik.

4. tumbuhnya kapabilitas dan kapasitas UMKM dalam negeri. Kebijakan atau program untuk meningkatkan kinerja, pertumbuhan, dan daya saing UMKM melalui pengembangan wirausaha baru, modal pengembangan manusia, penasihat layanan, peningkatan teknologi dan pengembangan produk, pemasaran, dan promosi.
5. Meningkatkan ketersediaan kredit. Kebijakan dan program untuk memastikan akses yang cukup terhadap dana yang memadai untuk mendorong perluasan UMKM di semua sektor dengan pembiayaan dan perbaikan atau rehabilitasi usaha.

Terdapat 9 (Sembilan) asas strategis yang dibuat untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Malaysia dengan menggunakan transformasi bisnis untuk menciptakan dinamika yang berklasifikasi global, berkelanjutan, dan future-proof.



*Gambar 1 Asas Strategis Perniagaan SME Corp (SME Corporation, 2022)*

Dari ke-sembilan asas strategis tersebut sebagai penyokong perkembangan organisasi unggulan yang memberikan bantuan dan dukungan komprehensif dan terintegrasi dengan tingkat kinerja yang tinggi, kompeten, efisien, dan efektif (SME Corporation, 2022). Sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, UKM harus berkembang mereka secara strategis agar lebih kompetitif menghadapi domestik, internasional dan globalisasi tantangan dan menawarkan desain produk/jasa yang baik dan kinerja. UKM juga memiliki peran kunci dalam menyelaraskan strategi bisnis seperti pengiriman, pemesanan, produktivitas dan daya tanggap dengan kebutuhan pelanggan (Ravi Ramasary A. M., 2020).

### **Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM**

UMKM harus terus berkembang untuk memenuhi tuntutan dunia usaha, termasuk kebutuhan akan pertumbuhan keuangan yang kuat dan produk yang berkualitas tinggi. undang-undang persaingan peraturan di Malaysia tidak secara khusus mengatur kemitraan UMKM; sebaliknya, mereka menetapkan batasan pangsa pasar bagi pelaku usaha yang ingin melaksanakan perjanjian dan membatasi ruang lingkup apa yang dilarang dan tidak dilarang dalam perjanjian. Ketentuan serupa mengenai penyalahgunaan posisi dominan terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Persaingan Usaha tahun 2010, yang berlaku untuk semua ukuran perusahaan. Salah satu keuntungan model Malaysia adalah pendekatan kuantitatifnya memiliki

ukuran yang sama, sehingga lebih mudah untuk memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan (S.H.S. Ulil Albab, 2023).

Secara sanksi, mengingat berada di bawah Kompetisi Malaysia semua ukuran bisnis tercakup dalam *Competition Act 2010 Malaysia* dan *Section 40 Competition Act 2010* memberikan denda jika terjadi pelanggaran pada kemitraan antara UMKM. MyCC mengeluarkan perintah kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran untuk menghentikan aktivitas pelanggaran, memberikan sarana kepada pelaku usaha untuk menghentikan pelanggaran, atau menghadapi sanksi keuangan. Mengenai sanksi finansial atau denda yang dapat diterapkan oleh Komisi Persaingan Usaha dalam rangka memberantas pelanggaran, peraturan Malaysia membatasi besaran denda sebesar 10% dari pendapatan pelaku usaha selama periode terjadinya pelanggaran (*Section 40 (40) Competition Act 2010*).

## KESIMPULAN

Apabila dikelola dengan baik, Usaha Menengah, Kecil, dan Menengah (UMKM) berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu industri pendongkrak perekonomian daerah adalah UMKM. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan dalam memberdayakan dan mengembangkan industri UMKM. *Section 40 (40) Competition Act 2010* Malaysia merupakan dua ketentuan pemerintah yang mendorong kemajuan UMKM di Malaysia.

Beberapa hal yang mendorong upaya pemerintah dalam mendukung UMKM di Malaysia dilakukam didukung oleh *stakeholder* yang memadai Mempertahankan daya saing global merupakan tujuan akhir pengembangan UMKM. Hal ini dapat dimengerti mengingat tujuannya adalah untuk memberdayakan UMKM agar dapat berkontribusi secara efektif terhadap pembangunan Malaysia di masa depan—khususnya, untuk mempertahankan daya saing Malaysia.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. A. (2002). An Overview of The Macroeconomic Contribution of Small and Medium Enterprise in Malaysia. In L. Bohn-Chye, *The Role of SMEs in National Economics in East Asia* (pp. 181-201). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- About SME Corp. Malaysia. (2020, February 18). Retrieved from SME CORP Official Website: <https://www.smecorp.gov.my/index.php/en/about/2015-12-21-08-49-11/about-sme-corp-malaysia>
- Alfred D. Chandler, J. (2005). *Strategy adn Structure*. England: MIT Press Paperback.
- Dina Arfianti Siregar, d. (2020). The Development of Micro, Small and Medium Enterprises Competitiveness inIndonesia and Malaysia: A Comparative. *International TVET Academic and Reasearch Conference (ITARC)* (pp. 28-37). Negeri Sembilan: Persatuan Kedokteran Teknikal Malaysia (PKTM).
- Indah Permata Sari, d. (2023). Analisa Kebijakan Publik Terhadap UMKM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 552-559.
- Mongid, A. (2011). Pengembangan Daya Saing UMKM di Malaysia dan Singapura: Sebuah Komparasi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 243-253.

- National Entrepreneur and SME Development Council (NESDC). (2021). Performance of MSME in Malaysia. In N. E. (NESDC), *MSME Insights* (pp. 62-75). Kuala Lumpur: SME Corporation Malaysia.
- Nurul Huda Md Yatim, d. (2019). The Effect of Government Intervention on The Sustainable Competitive Advantage Among SMEs in Malaysia. *International Journal of Modern Trends in Business Reseach (IJMTBR)*, 15-22.
- Ravi Ramasary, A. M. (2020). Exploring Logistics Strategy in Malaysian SMEs Performance. *International Journal of Supply Chain Management*, 1269-1275.
- Ravi Ramasary, A. M. (2020). Exploring Logistics Strategy in Malaysian SMEs Performance. *International Journal of Supply Chain Management*, 1269-1275.
- S.H.S. Ulil Albab, d. (2023). Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 75-86.
- SME Corporation. (2022). *Pelan Strategik Perniagaan 2022-2030*. Kuala Lumpur: SME Corporation.
- The Star*. (2023, July 27). Retrieved from thestar.com.my:  
[https://www.thestar.com.my/business/business-news/2023/07/27/malaysia039s-msme-gdp-surges-116-in-2022-to-rm5804bil--dosm#:~:text=KUALA%20LUMPUR%3A%20Malaysia's%20micro%2C%20small,of%20Statistics%20Malaysia%20\(DoSM\).](https://www.thestar.com.my/business/business-news/2023/07/27/malaysia039s-msme-gdp-surges-116-in-2022-to-rm5804bil--dosm#:~:text=KUALA%20LUMPUR%3A%20Malaysia's%20micro%2C%20small,of%20Statistics%20Malaysia%20(DoSM).)
- Yahya Antu, d. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap UMKM di Kota Gorontalo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 230-237.
- Yee-Whah Chin, E.-S. L. (2018). SME Policies and Performance in Malaysia. *Economics Working Paper*, 1-40.
- Yunirti, Y. (2019). Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 102-110.